

0

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI**

**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal  
31 Desember 2019

Jalan Cindua Mato No. 7 Bukittinggi

Telp/fax 0752-22782

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bukittinggi, Januari 2020  
Sekretaris,

Ir Kasdanil, SH  
NIP. 196809121994031009

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	53
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran	59

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**  
***JL. CINDUA MATO NO. 7 BUKITTINGGI***  
***TELEPON / FAXIMILE 0752-22782***

---

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bukittinggi, Januari 2020  
Sekretaris,

Ir Kasdanil, SH  
NIP. 196809121994031009

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp10.622.362.232,- atau mencapai 93 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.424.930.000,-

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.569.632.060,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 324.896.708,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.234.915.350,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp9.820.002,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp1.569.632.060,-

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp11.287.328.426,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai Rp(11.287.328.426). Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp(11.411.400) Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp 5.378.600,- dan beban dari kegiatan non operasional lainnya adalah sebesar Rp 16.790.000,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(11.298.739.826).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp 1.593.887.405,- dikurangi defisit-LO sebesar Rp(11.298.739.826) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp11.274.360.923,- sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp1.569.508.502,-

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEMESTER II TA 2019		% Terhadap Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-		0,00	62.560.000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	B.1.1				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	<b>0,00</b>	<b>62.560.000</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	2.438.386.000	2.367.249.720	97,08	2.210.184.899
Belanja Barang	B.4	8.606.113.000	7.877.231.912	91,53	5.126.467.869
Belanja Barang Sosial	B.5	-	-	0,00	
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>11.044.499.000</b>	<b>10.244.481.632</b>	<b>92,76</b>	<b>7.336.652.768</b>
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	380.431.000	377.880.600	99,33	951.556.219
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	
Pinjaman dan Hibah	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Barang Hibah	B.10	-	-	0,00	
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>380.431.000</b>	<b>377.880.600</b>	<b>99,33</b>	<b>951.556.219</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**II. NERACA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-19	2018
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	242.517.258	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	82.379.450	435.073.794
Persediaan yang Belum Diregister	C.10	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>324.896.708</b>	<b>435.073.794</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	2.483.028.079	2.105.147.479
Gedung dan Bangunan	C.15	131.228.000	131.228.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(1.379.340.729)	(1.089.018.537)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.234.915.350</b>	<b>1.147.356.942</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	153.014.687	153.014.687
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(143.194.685)	(141.558.018)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>9.820.002</b>	<b>11.456.669</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.569.632.060</b>	<b>1.593.887.405</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	123.558	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>123.558</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>123.558</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.26	1.569.508.502	1.593.887.405
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.569.508.502</b>	<b>1.593.887.405</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

URAIAN	CAT	31 Desember 2019	TA 2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	2.367.249.720	2.210.184.899
Beban Persediaan	D.3	857.853.545	310.056.210
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.183.937.295	3.538.051.273
Beban Pemeliharaan	D.5	119.030.450	85.108.750
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.467.298.557	1.066.209.428
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	291.958.859	178.585.509
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>11.287.328.426</b>	<b>7.388.196.069</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN</b>		<b>(11.287.328.426)</b>	<b>(7.388.196.069)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.12		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			62.560.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			132.864.600
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			(70.304.600)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.378.600	18.643.952
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		16.790.000	76.200
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(11.411.400)</b>	<b>(51.736.848)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(11.411.400)</b>	<b>(7.439.932.917)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(11.298.739.826)</b>	<b>(7.439.932.917)</b>

*(Dalam Rupiah)*

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER  
2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	1.593.887.405	618.634.951
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(11.298.739.826)	(7.439.932.917)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.9	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.10	-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.11	11.274.360.923	8.415.185.371
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(24.378.903)	975.252.454
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>1.569.508.502</b>	<b>1.593.887.405</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi merupakan instansi vertikal yang mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum didirikan sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan di Indonesia yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan dan akuntabel. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Entitas berkedudukan di Jalan Cindua Mato No. 7 Bukittinggi – Sumatera Barat

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Melalui peran tersebut diharapkan menghasilkan Pemilihan Umum yang berkualitas.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Komisi Pemilihan Umum mempunyai visi *“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Untuk

mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Walikota dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis*

**A.3. Basis Akuntansi**

*Akuntansi*

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis pkas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar*

**A.4. Dasar Pengukuran**

*Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*      **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*      **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penyisihan</b>
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.	0.5%
Kurang	Satu bulan terhitung sejak	10%

Lancar	tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman	25

Tahunan	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, *Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	2.173.868.000	2.438.386.000
Belanja Barang	8.307.959.000	8.606.113.000
Belanja Modal	15.000.000	380.431.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>10.496.827.000</b>	<b>11.424.930.000</b>

*Realisasi*

*Pendapatan*

*Rp 0,-*

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan Negara pada per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 0,- Rincian Estimasi Pendapatan Dan Realisasi BNPB lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam table berikut ini:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2019 mengalami perubahan dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena tahun ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak melakukan pelelangan Kotak Suara seperti tahun sebelumnya

*Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI Per 31 Desember TA. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	62.560.000	0,00
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

*Realisasi Belanja Negara Rp.10.622.362.232,-*

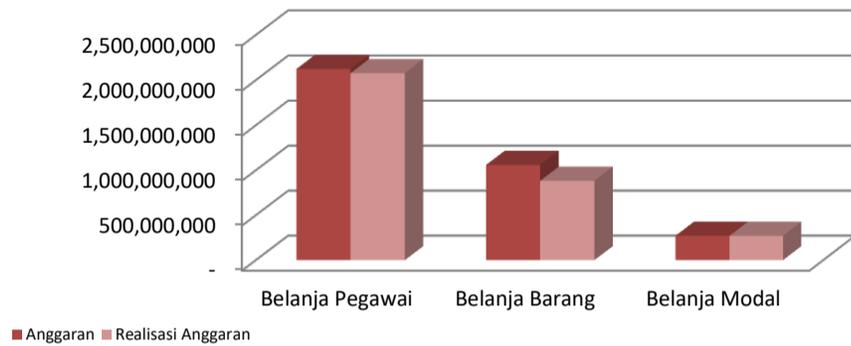
**B.2. Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2019 adalah sebesar Rp10.622.362.232,- atau 92,98% dari anggaran belanja sebesar Rp11.424.930.000,- .Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Semester II TA 2019*

URAIAN	Semester I TA 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg
Belanja Pegawai	2.438.386.000	2.367.249.720	97,08
Belanja Barang	8.606.113.000	7.877.231.912	91,53
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Belanja Modal	380.431.000	377.880.600	99,33
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>11.424.930.000</b>	<b>10.622.362.232</b>	<b>92,98</b>
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.424.930.000</b>	<b>10.622.362.232</b>	<b>92,98</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Semester II TA 2018, Realisasi Belanja Semester II TA 2019 mengalami peningkatan sebesar 28,16%. Hal ini disebabkan antara lain karena di Tahun 2019 adanya PNS yang tugas belajar kembali Aktif sebanyak 2 (dua) orang.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018*

URAIAN	Realisasi Semester II TA 2019	Realisasi TA. 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.367.249.720	2.210.184.899	7,11
Belanja Barang	7.877.231.912	5.126.467.869	53,66
Pinjaman dan Hibah			
Belanja Modal	377.880.600	951.556.219	(60,29)
<b>Jumlah</b>	<b>10.622.362.232</b>	<b>8.288.208.987</b>	<b>28,16</b>

*Belanja Pegawai Rp2.367.249.720,-*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai pada Semester II TA 2019 dan Semester II TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.367.249.720,- dan Rp2.210.184.899,- Realisasi belanja Semester II TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 7.11% (persen) dari Semester II TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena ada kenaikan persentase gaji di Tahun 2019 ini.

*Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018*

URAIAN	Realisasi Per 31 Des 2019	Realisasi Per 31 Des 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	815.355.856	709.192.829	14,97
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.551.894.537	1.500.992.070	3,39
Belanja Honorarium			-
Belanja Lembur		-	-
Belanja Vakasi		-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.367.250.393</b>	<b>2.210.184.899</b>	<b>7,11</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	673	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.367.249.720</b>	<b>2.210.184.899</b>	<b>7,11</b>

*Belanja*

*Barang*

*Rp7.877.231.912,-*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2019 dan Semester II TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 7.877.231.912,- dan Rp5.126.467.869,- Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 53.81% dari Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2018. Peningkatan ini sangat signifikan dikarenakan banyaknya anggaran yang untuk menghadapi Tahapan Pemilu 2019

*Perbandingan Belanja Barang Per 31 Des 2019 dan Per 31 Des 2018*

URAIAN	REALISASI Per 31 Des 2019	REALISASI Per 31 Des 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	365.419.500	127.042.208	-
Belanja Barang Non Operasional	4.679.079.850	310.056.210	-
Belanja Barang & Jasa	1.250.903.555	3.538.051.273	-
Belanja Pemeliharaan	119.030.450	85.108.750	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.470.398.557	1.066.209.428	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>7.884.831.912</b>	<b>5.126.467.869</b>	<b>53,81</b>
Pengembalian Belanja	7.600.000	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.877.231.912</b>	<b>5.126.467.869</b>	<b>53,66</b>

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. KPU Kota Bukittinggi tidak mempunyai belanja modal tanah.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Belanja Modal  
Rp377.880.600,-*

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp 377.880.600,- dan Rp951.556.219,- mengalami penurunan sebesar 60.29 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Hal ini dikarenakan karena di Tahun 2019 tidak begitu banyak Anggaran Pengadaan seperti di Tahun 2018 banyak pengadaan untuk Tahapan Pemilu 2019

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit /laptop	0	149.601.350	
Camera Digital	0	0	
Filling Cabinet	0	0	
Peralatan dan Mesin	377.880.600	801.954.869	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>377.880.600</b>	<b>951.556.219</b>	<b>-60,29</b>

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan R0. Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

***B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan***

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki anggaran belanja modal Jalan,Irigasi dan Jaringan

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

***B.5.5 Belanja Modal Lainnya***

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki anggaran belanja modal lainnya.

*Belanja  
Bantuan  
Sosial Rp0*

### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki anggaran belanja modal bantuan sosial.

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di*

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

*Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan  
2018*

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Uang Tunai	-	-
Bank Bri No.acc 0015.01.000.566.30.6	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

**C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Dalam hal ini KPU Kota Bukittinggi tidak memiliki bendahara penerimaan)

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2019 dan 2018*

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Uang Tunai	-	-
Bank .....	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya  
dan Setara  
Kas Rp  
242.517.258,-*

**C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Des 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp242.517.258. dan Rp0.- Jumlah ini berasal dari saldo brankas kas bendahara yang bersumber dari hibah.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang

bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Jenis	Per 31 Des 2019	TA 2018
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	0
Pajak PPh yang belum disetor	-	0
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	0
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Piutang Bukan Pajak Rp0.*

**C.4 Piutang Bukan Pajak**

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Des 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Hal ini disebabkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki Piutang Bukan pajak Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak*

Uraian	TA 2019	TA 2018
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp 0*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Des 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR*

No	Nama	Tahun 2019	Tahun 2018
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Bagian Lancar TPARp0* **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Des 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki bagian lancar.

*Rincian Bagian Lancar TPA*

No	Nama	TA 2019	TA 2018
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka PendekRp0*

**C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Des 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Belanja  
Dibayardi  
Muka Rp0.*

### C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Des 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Belanja Dibayar di Muka*

Jenis	TA 2019	TA 2018
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Persediaan  
Rp82.379.450,-*

### C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 82.379.450,- dan Rp435.073.794.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2019 dan 2018*

Jenis	TH 2019	TH 2018
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	82.379.450	435.073.794
<b>Jumlah</b>	<b>82.379.450</b>	<b>435.073.794</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan  
TP/TGR  
Rp0

**C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2019 dan 2018*

No	Debitur	TH 2019	TH 2018
1			
2			
3			
<b>Jumlah</b>		-	-

Tagihan  
Penjualan

**C.11 Tagihan Penjualan Angsuran**

*Angsuran  
Rp.0*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA TA 2019 dan 2018*

No	Debitur	TH 2019	TH 2018
1			
2			
3			
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang  
Jangka  
Panjang  
Rp0*

**C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2019*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-	-	-

*Tanah*

**C.13 Tanah**

*Rp0*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

01-Jan-19		-
Mutasi tambah:		
Pembelian		-
Mutasi kurang:		
Revaluasi aset		-
Penyitaan pengadilan		-
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		<b>-</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah TA 2019*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Tanah Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dengan luas 453.75 m2 merupakan tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang terletak di Jl. Cindua Mato No.7, Bukittinggi bersatus pinjam pakai Sesuai surat pinjam pakai nomor 1 /KB/KPU-Kota-003.435130/Tahun 2015 Tanggal 25 Maret 2015.

*Peralatan dan*

*Mesin*

*Rp2.483.028.079,*

*-*

**C.14 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 2.483.028.079,- dan Rp 2.105.147.479. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>2.105.147.479</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	377.880.600
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>2.483.028.079</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-1.379.291.274
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>1.103.736.805</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin KPU Kota Bukittinggi selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 377.880.600,- yang terdiri dari :

1. Kode Akun 3360.951 belanja modal sebanyak 1 buah kendaraan sebesar Rp 328.000.000.-
2. Kode Akun 3360.951 belanja modal sebanyak 2 buah sofa dan meja sebesar Rp 34.925.000,-
- 3, Kode Akun 3364.032 belanja modal Pengadaan Partisi Rumah Pintar Pemilu sebesar Rp 14.955.600,-

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp131.228.000*

### **C.15 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp131.228.000 dan Rp 131.228.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>131.228.000</b>
Mutasi tambah:	-
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>131.228.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>131.228.000</b>

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi  
Rp0*

### **C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	-

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki jalan, jaringan dan irigasi

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp0*

### **C.17 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>0</b>

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki aset tep lainnya.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp0*

### **C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki kontruksi dalam pengerjaan.

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp(1.379.340.729  
)*

### **C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp 1.379.340.729,- dan Rp (1.089.018.537) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
TA 2019 dan 2018*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.483.028.079	1.379.340.729	1.103.687.350
2	Gedung dan Bangunan	131.228.000	0	131.228.000
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>2.614.256.079</b>	<b>1.379.340.729</b>	<b>1.234.915.350</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak  
Berwujud Rp0*

### **C.20 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak mempunyai aset tak berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud TA 2019*

Uraian	Nilai Perolehan
-	0
-	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

*Aset Lain-Lain* **C.21 Aset Lain-Lain**  
*Rp153.014.687*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp153.014.687 dan Rp153.014.687. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>153.014.687</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>153.014.687</b>
Akumulasi Penyusutan	(143.194.685)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>9.820.002</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan adalah dari reklasifikasi dari peralatan dan mesin yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada

Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp(143.194.685,-)*

### **C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp (143.194.685) dan Rp (141.558.018) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset tak Berwujud	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain	153.014.687	143.194.685	9.820.002
<b>Jumlah</b>	<b>153.014.687</b>	<b>143.194.685</b>	<b>9.820.002</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari KPPN Rp0*

### **C.23 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp123.558,-*

**C.24 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp123.558,- dan Rp0. Jumlah Rp 123.558,- ini berasal dari jasa giro bank dari rekening Hibah KPU Kota Bukittinggi yang didapatkan pada Tahun 2019 yang belum disetorkan per tanggal neraca 31 Desember 2019

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-	Pendapatan Jasa Giro belum disetor ke kas negara
Potongan pajak yang belum disetor	-	Potongan pajak belanja UP belum disetor ke kas negara
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak
<b>Total</b>	-	

*Pendapatan Diterima di Muka Rp0*

**C.25 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
<b>Total</b>	-

*Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0*

**C.26 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, beban yang masih harus dibayarkan pada KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019 tidak ada.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2019 dan TA 2018*

Uraian	TH 2019	TH 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Ekuitas Rp1.569.508.502,-*

**C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.569.508.502,- dan Rp 1.593.887.405,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan PNBPN Rp0,-*

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	62.560.152	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>62.560.152</b>	<b>0</b>

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki PNPB.

*Beban*

*Pegawai*

*Rp2.367.249.720,-*

#### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.367.249.720 dan Rp 2.210.184.899 . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### *Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	815.355.183	709.192.829	14,97
Beban Tunjangan-tunjangan	0	0	0,00
Beban Honorarium dan Vakasi	1.551.894.537	1.500.992.070	3,39
Beban Lembur	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.367.249.720</b>	<b>2.210.184.899</b>	<b>7,11</b>

*Beban  
Persediaan  
Rp.857.853.545,-*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 857.853.545 dan Rp 310.056.210. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	857.853.545	310.056.210	177
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	0
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>857.853.545</b>	<b>310.056.210</b>	<b>177</b>

*Beban Barang dan Jasa  
Rp.6.183.937.295,-*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 6.183.937.295,- dan Rp 3.538.051.273. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi pada tahun 2019 dikarenakan KPU Kota Bukittinggi selain masih ada tahapan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 selain itu juga sudah memasuki tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	199.307.900	138.462.500	43,94
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	66.000	0	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	149.880.000	96.520.000	55,28
Beban Barang Operasional Lainnya	16.165.600	12.050.500	34,15
Beban Bahan	1.549.375.250	487.881.315	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	3.033.733.000	2.117.400.000	43,28
Beban Barang Non Operasional Lainnya	91.471.600	0	0,00
Beban Langganan Listrik	10.474.350	10.275.350	1,94
Beban Langganan Telepon	1.166.400	1.701.750	(31,46)
Beban Langganan Air	1.330.600	1.211.000	9,88
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	820.052.600	9.964.300	8129,91
Beban Sewa	269.313.995	242.971.558	10,84
Beban Pos dan Giro	0	58.500	
Beban Aset Ekstrakomtable	17.548.000	17.548.000	
Belanja Jasa Profesi	41.600.000	28.710.000	100,00
Beban Jasa Lainnya	820.052.600	373.296.500	119,68
<b>Jumlah</b>	<b>7.021.537.895</b>	<b>3.538.051.273</b>	<b>98,46</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp.119.030.45  
0,-*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 119.030.450,- dan Rp 85.108.750,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan realisasi pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	119.030.450	0	0,00
Beban Persediaan Sku Cadang	0	85.108.750	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>119.030.450</b>	<b>85.108.750</b>	<b>39,86</b>

*Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp1.467.298.5  
57,-*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.467.298.557,- dan Rp 1.066.209.428. Beban Perjalan Dinas tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 190.02 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Beban tersebut merupakan beban yang

terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	542.413.331	417.588.428	29,89
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	197.346.800	151.875.000	29,94
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	642.754.900	355.880.000	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	84.783.526	140.866.000	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.467.298.557</b>	<b>1.066.209.428</b>	<b>37,62</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban  
Bantuan  
Sosial Rp0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Dalam hal ini, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki Beban Bantuan Sosial. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp291.958.859,-*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 291.958.859,- dan Rp 178.585.509. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2019 dan 2018*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.379.340.729	173.484.550	695
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	3.263.542	(100)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan			-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	143.194.685	1.837.417	7.693
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1.522.535.414</b>	<b>178.585.509</b>	<b>753</b>
			-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.522.535.414</b>	<b>178.585.509</b>	<b>753</b>

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam

*Tertagih Rp0*

suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Surplus*

*/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp(11.411.400)*

**D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai tahun Lalu	0	0	-94,16
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	5.378.600	62.560.000	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	16.790.000	132.864.600	0,00
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>11.411.400</b>	<b>195.424.600</b>	<b>(94)</b>

*\*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa Rp0*

**D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki Pos Luar Biasa.

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### *Ekuitas Awal*

*Rp  
1.593.887.405,-*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.593.887.405,- dan Rp618.634.951,-

### *Defisit LO*

*Rp(11.298.739.826  
,-)*

#### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp(11.298.739.826) dan Rp (7.439.932.917) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### *Penyesuaian*

#### *Nilai Aset*

*Rp0*

#### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### *Koreksi Nilai*

#### *Persediaan*

*Rp0*

#### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih*

**E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Revaluasi Aset Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0,- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki Selisih Revaluasi Aset Tetap.

*Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0*

**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Lain-Lain Rp0*

**E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Transaksi*

*Antar Entitas*

*Rp11.274.360.92*

*3*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 11.274.360.923 dan Rp 8.415.185.371,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

*Diterima dari*

*Entitas Lain*

*/Ditagihkan ke*

*Entitas Lain*

*Rp 0*

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp 0,- sedangkan DKEL sebesar Rp (0),-

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

*Transfer*

*Masuk /*

*Transfer*

*Keluar Rp 0,-*

Transfer Masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	-
2	Persediaan	-	-
	<b>Jumlah</b>		- 0

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0. Dalam hal ini KPU Kota Bukittinggi tidak memiliki tranfer masuk dan transfer keluar.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp 1.569.508.502,-*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.569.508.502,- dan Rp 1.593.887.405,-

#### **A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

##### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

##### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Sisa Pengembalian Dana TUP KPU Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp 1.265.500,- dari Sejumlah yang dimintakan yaitu 136.011.900,- yang disetor kepada negara tgl 31 Desember 2019 dengan bukti penerimaan negara ada di bukti terlampir
2. Sisa Pengembalian UP KPU Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp 1.000.100,- dari sejumlah yg dimintakan Rp 200.000.000,- yang disetor kepada negara tgl 31 Desember 2019 dengan bukti penerimaan negara ada di bukti terlampir
3. Adanya Pengembalian Belanja Sebesar Rp 4.500.000,- dari akun 3364.053 Honorarium relawan demokrasi dikarenakan honor tidak diambil karena tidak

melanjutkan pekerjaannya. Disetor kepada negara tgl 31 Desember 2019 dengan bukti penerimaan negara ada di bukti terlampir

4. Adanya Pengembalian Belanja Sebesar Rp 3.100.000,- dari akun 3364.057 dari kegiatan Rapat dalam kantor. pengembalian ini dilakukan karena terkait adanya pemeriksaan Inspektorat ke Kantor KPU Kota Bukittinggi di bulan Oktober. Disetor kepada negara tgl 31 Desember 2019 dengan bukti penerimaan negara ada di bukti terlampir

Bukittinggi, Januari 2020  
Sekretaris,

Ir. Kasdanil, SH  
NIP. 196809121994031009

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi  
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,  
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2018	Tahun 2019	Per 31-12-2019	Per 31-12-2019
<b>A</b>	<b>Tanah</b>						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.143.105.000	505.510.000	71.058.571	576.568.571	<b>566.536.429</b>
2	Alat Ukur	5	0	-	-	-	-
3	Alat Kantor	5	103.270.910	65.204.613	10.395.182	75.599.795	<b>27.671.115</b>
4	Alat Rumah Tangga	5	201.328.600	50.093.000	30.709.460	80.802.460	<b>120.526.140</b>
5	Alat Studio	5	37.928.050	13.042.835	6.714.210	19.757.045	<b>18.171.005</b>
6	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	12.694.000	1.269.399	846.266	2.115.665	<b>10.578.335</b>
7	Alat Khusus Kepolisian	4	30.856.200	3.857.026	7.714.050	11.571.076	<b>19.285.124</b>
8	Unit Alat Laboratorium	8	18.927.400	18.927.400	-	18.927.400	-
9	Alat Komunikasi	5	10.156.500	8.928.350	350.900	9.279.250	<b>877.250</b>
10	Komputer Unit	4	561.618.730	305.744.636	80.602.185	386.346.821	<b>175.271.909</b>
11	Peralatan Komputer	4	377.705.689	114.979.765	81.594.426	196.574.191	<b>181.131.498</b>
12	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	5.830.000	1.166.000	583.000	1.749.000	<b>4.081.000</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>2.503.421.079</b>	<b>1.088.723.024</b>	<b>290.568.250</b>	<b>1.379.291.274</b>	<b>1.124.129.805</b>
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>						
1	Bangunan Gedung Tempat kerja	50	131.228.000	4.895.313	3.263.542	8.158.855	<b>123.069.145</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>131.228.000</b>	<b>4.895.313</b>	<b>3.263.542</b>	<b>8.158.855</b>	<b>123.069.145</b>
<b>D</b>	<b>Aset Tetap Yang Tidak Digunakan</b>						
1	Alat Ukur	5	1.089.000	1.089.000	-	1.089.000	-
2	Alat Kantor	5	3.649.000	3.649.000	-	3.649.000	-
3	Alat Rumah Tangga	5	17.908.700	17.908.700	-	17.908.700	-
4	Alat Studio	5	10.821.400	10.821.400	-	10.821.400	-
5	Alat Komunikasi	5	3.114.000	3.114.000	-	3.114.000	-
6	Unit Alat Laboratorium	8	2.172.000	2.172.000	-	2.172.000	-
7	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	24.550.000	13.093.331	1.636.667	14.729.998	<b>9.820.002</b>
8	Alat Khusus Kepolisian	4	4.999.500	4.999.500	-	4.999.500	-

\* Beban Amortisasi